

PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

Muhammad Octian Rhamadandy

NPP. 32.0261

Asdaf Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu

Program Studi Studi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Email: 32.0261@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Piet Hein Pusung, S.IP., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Stunting is a significant nutritional issue that remains a concern in Indonesia, including in Bengkulu City. The government aims to reduce the prevalence of stunting from 12.9% in 2022 to 6.7% in 2023. The Department of Women Empowerment and Child Protection, Population Control, and Family Planning (DP3A2KB) of Bengkulu City plays a strategic role in accelerating stunting reduction through various programs. However, challenges exist, including limited health infrastructure in remote areas, a shortage of healthcare personnel, and issues related to poverty and food security that have yet to be fully addressed. **Purpose:** This study aims to analyze the role of DP3A2KB in accelerating stunting reduction in Bengkulu City. **Method:** A qualitative approach was employed, utilizing data collection techniques through interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted using Biddle and Thomas's role theory, focusing on four dimensions: expectation, norm, performance, and evaluation. **Results:** The research findings indicate that DP3A2KB plays a crucial role in reducing stunting. However, significant challenges persist, including limited healthcare infrastructure, insufficient human resources, and data validity issues. Efforts include strengthening nutritional interventions, educating the community, and enhancing cross-sector coordination. **Conclusion:** DP3A2KB of Bengkulu City has demonstrated a significant role in accelerating stunting reduction. Nevertheless, effectiveness can be further improved through optimizing programs, enhancing human resource capacity, and strengthening infrastructure. This research is expected to contribute to the development of better policies for stunting management.

Keywords: Stunting, DP3A2KB, Population Control

ABSTRAK

Rumusan Masalah/Latar Belakang (GAP): Stunting merupakan masalah gizi penting yang masih menjadi perhatian di Indonesia, termasuk di Kota Bengkulu. Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting dari 12,9% pada tahun 2022 menjadi 6,7% pada tahun 2023. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A2KB) Kota Bengkulu berperan strategis dalam percepatan penurunan stunting melalui berbagai program. Namun, terdapat tantangan dalam hal keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan validitas data. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

peranan DP3A2KB dalam percepatan penurunan stunting di Kota Bengkulu. **Metode:** Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data mengacu pada teori peran Biddle dan Thomas, dengan empat dimensi: harapan, norma, kinerja, dan evaluasi. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan DP3A2KB dalam penurunan stunting sudah berjalan baik, dengan tingkat harapan tinggi dari masyarakat. Namun, terdapat kendala yang signifikan, termasuk infrastruktur kesehatan yang terbatas, kurangnya pemahaman SDM, dan masalah validitas data. Upaya yang dilakukan mencakup penguatan intervensi gizi, pendidikan masyarakat, dan koordinasi lintas sektor. **Kesimpulan:** DP3A2KB Kota Bengkulu telah menunjukkan peran penting dalam percepatan penurunan stunting, tetapi masih perlu meningkatkan efektivitas melalui optimalisasi program, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan infrastruktur. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam penanganan stunting.

Kata Kunci: Stunting, DP3A2KB, Pengendalian Penduduk

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius dalam bidang kesehatan masyarakat, khususnya terkait permasalahan gizi yang berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu masalah gizi yang masih menjadi perhatian utama adalah stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Analisis survei nasional menunjukkan bahwa berbagai faktor—termasuk pola asuh, sanitasi, serta ketersediaan pangan—berkontribusi signifikan terhadap stunting pada anak di bawah lima tahun di Indonesia (Pramono & Hidayati, 2020).

Selain stunting, terdapat pula masalah wasting, anemia, dan Kurang Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil yang turut berkontribusi terhadap tingginya angka Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan gizi buruk pada anak. Studi menunjukkan bahwa praktik pemberian ASI eksklusif dan waktu pemberian makanan pendamping berperan penting dalam mencegah stunting dan wasting (Sunarsih & Daryani, 2021).

Stunting telah ditetapkan sebagai prioritas nasional oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting dari 27,6% pada tahun 2019 menjadi 14% pada tahun 2024. Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas penduduk melalui pembangunan yang terencana.

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa prevalensi stunting nasional telah menurun dari 24,4% pada tahun 2021 menjadi 21,6% pada tahun 2022. Meski mengalami penurunan, angka tersebut masih di atas ambang batas yang ditetapkan oleh WHO, yakni 20%. Di Provinsi Bengkulu, prevalensi stunting tercatat sebesar 19,8% pada tahun 2022, sementara di Kota Bengkulu, terjadi penurunan signifikan dari 12,9% menjadi 6,7% hanya dalam waktu satu tahun (2022–2023). Capaian ini menunjukkan adanya upaya serius dan kolaboratif dari pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana (DP3A2KB) Kota Bengkulu menjadi salah satu aktor penting dalam percepatan penurunan stunting. Melalui program-program seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), edukasi gizi, serta peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita, DP3A2KB berperan strategis dalam mendukung pencegahan stunting. Pendekatan berbasis komunitas juga terbukti efektif menurunkan prevalensi stunting, terutama di kawasan urban padat penduduk (Nguyen et al., 2021). Namun demikian, meskipun tren penurunan stunting di Kota Bengkulu cukup positif, masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan infrastruktur kesehatan di wilayah terpencil, keterbatasan tenaga kesehatan, serta persoalan kemiskinan dan ketahanan pangan yang belum terselesaikan secara menyeluruh.

Oleh karena itu, penting untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peranan DP3A2KB dalam percepatan penurunan stunting di Kota Bengkulu, agar strategi yang telah dilakukan dapat menjadi model percontohan sekaligus bahan evaluasi untuk peningkatan kebijakan ke depan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun isu stunting telah menjadi perhatian nasional dan berbagai kebijakan telah dicanangkan oleh pemerintah pusat untuk menurunkan prevalensinya, namun hingga saat ini masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman mengenai implementasi kebijakan tersebut di tingkat daerah, khususnya peran lembaga teknis seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A2KB). Sebagian besar kajian yang ada lebih berfokus pada faktor penyebab stunting secara umum dan upaya penanganannya di tingkat nasional atau provinsi, namun belum banyak yang secara spesifik mengkaji bagaimana peranan DP3A2KB di tingkat kota, terutama di Kota Bengkulu yang menunjukkan capaian penurunan angka stunting yang sangat signifikan.

Penurunan angka stunting di Kota Bengkulu dari 12,9% pada tahun 2022 menjadi 6,7% pada tahun 2023 memang patut diapresiasi. Namun, penurunan drastis dalam kurun waktu kurang dari satu tahun ini juga menimbulkan pertanyaan kritis mengenai keakuratan data, efektivitas intervensi yang dilakukan, serta keberlanjutan program-program yang telah dijalankan. Tidak sedikit yang mempertanyakan apakah data sebelumnya sudah mencerminkan kondisi riil di lapangan atau apakah terdapat revisi metodologi dalam proses pendataan. Di sisi lain, belum terdapat cukup banyak penelitian yang mengevaluasi secara menyeluruh kontribusi program-program DP3A2KB terhadap penurunan angka stunting ini.

Kesenjangan inilah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, yakni untuk mengisi ruang kosong dalam kajian ilmiah terkait peranan DP3A2KB dalam percepatan penurunan stunting di Kota Bengkulu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai strategi, capaian, serta tantangan yang dihadapi lembaga tersebut dalam mengintervensi masalah stunting, sekaligus menjadi bahan evaluatif bagi pengambilan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks Percepatan Penurunan Stunting.

Penelitian Pertama oleh Piet Hein Pusung (2024) yang berjudul Peranan Kampung KB dalam pengendalian angka kelahiran di Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kampung KB (Kampung Keluarga Berkualitas) memiliki peran

strategis dalam pengendalian angka kelahiran di Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga yang bijak melalui edukasi, konseling, dan bimbingan, sehingga dapat mengurangi angka kelahiran tidak terencana dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Kampung KB berhasil memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran dan kualitas hidup masyarakat, terutama di tingkat kampung atau dusun. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan, seperti kebutuhan ekonomi masyarakat yang tinggi sehingga mengurangi partisipasi mereka dalam program, serta proses administrasi yang dianggap rumit dan memakan waktu. Selain itu, efektivitas komunikasi program Kampung KB masih perlu ditingkatkan karena sebagian masyarakat belum memahami sepenuhnya manfaat program ini.

Penelitian Kedua oleh Imelda Hutasoit (2024) yang berjudul *Effectiveness of the policy to accelerate stunting reduction through convergence action for handling stunting in north sulawesi province*. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan aksi konvergensi dalam penanganan stunting cukup efektif dalam meningkatkan koordinasi lintas sektor, seperti sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Koordinasi ini mendukung pelaksanaan program penyuluhan gizi, pemberian makanan tambahan, layanan kesehatan ibu dan anak, serta penyediaan sanitasi. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan berupa kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan akses layanan di daerah terpencil, dan masalah integrasi data antar sektor, yang menghambat efektivitas kebijakan secara merata di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, analisis dokumen kebijakan, dan observasi langsung terhadap implementasi kebijakan di lapangan.

Penelitian Ketiga oleh Ilham Wilya Putra (2024) yang berjudul *Peran Dinas Kesehatan dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Pasaman Barat*. Penelitian ini menyoroti peran Dinas Kesehatan dalam mengatasi stunting di Kabupaten Pasaman Barat. Sebagai lembaga pemerintah, Dinas Kesehatan memiliki kewajiban untuk menjalankan sebagian tanggung jawab daerah di sektor kesehatan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia saat ini memprioritaskan penanganan gizi buruk, termasuk mempercepat penurunan angka stunting, mengingat dampaknya yang luas dan berjangka panjang pada tumbuh kembang anak. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan peran penting Dinas Kesehatan dalam menekan angka stunting, melalui berbagai program seperti penyuluhan, pemeriksaan kesehatan, distribusi suplemen nutrisi, serta kegiatan pemantauan dan evaluasi. Namun, beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan minimnya koordinasi antar sektor, masih perlu diatasi.

Penelitian Keempat oleh Rudmini Fatris (2021) yang berjudul *Strategi Dinas Kesehatan dalam Penanggulangan Prevalensi Stunting Pada Anak Balita di Kabupaten Simeulue*. (Raranta:2022) menunjukkan bahwa Strategi yang dirumuskan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue dalam menangani stunting pada balita telah cukup efektif dan terukur, terbukti dari kejelasan visi, misi, tujuan, sasaran, serta kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur langkah-langkah pencegahan dan penanganan stunting secara terpadu di desa-desa yang menjadi fokus intervensi di Kabupaten Simeulue.

Penelitian Kelima oleh Nurleli (2024) yang berjudul *Peran Dinas Pemberdayaan*

Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P3AP2KB memiliki peran penting dalam percepatan penurunan stunting melalui koordinasi dan sinkronisasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Namun, terdapat kendala seperti belum optimalnya pengawalan program, program yang belum menyoar sasaran prioritas, dan minimnya anggaran. Penelitian ini menyarankan peningkatan jejaring kemitraan dan pengembangan media komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan stunting.

1.4 Pernyataan Kebaruan Karya Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang signifikan dibandingkan dengan lima penelitian sebelumnya, yang ditunjukkan melalui perbedaan fokus kajian, pendekatan teoritik, karakteristik lokasi, serta hasil temuan lapangan.

Pertama, dari sisi topik, penelitian ini menitikberatkan pada analisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A2KB) Kota Bengkulu dalam percepatan penurunan stunting. Ini berbeda dengan penelitian sebelumnya seperti Imelda Hutasoit (2024) dan Ilham Wilya Putra (2024) yang lebih menyoroer peran sektor kesehatan atau intervensi lintas sektor secara umum, tanpa fokus spesifik pada DP3A2KB.

Kedua, dari pendekatan teoritik, penelitian ini menggunakan teori efektivitas Beni Fekei (2016) dengan indikator yang disesuaikan terhadap konteks program kerja DP3A2KB. Pendekatan ini belum pernah digunakan pada studi-studi sebelumnya yang umumnya hanya menggambarkan peran tanpa mengukur efektivitas secara sistematis.

Ketiga, dari sisi lokasi dan konteks kebijakan, penelitian ini dilakukan di Kota Bengkulu, yang mencatat penurunan stunting signifikan dari 12,9% menjadi 6,7% dalam waktu satu tahun. Capaian ini berbeda dari daerah lain dalam penelitian terdahulu, dan memerlukan telaah kritis terkait keberlanjutan dan efektivitas program.

Keempat, penelitian ini menghadirkan hasil lapangan yang mendalam, termasuk temuan terkait program unggulan, keterbatasan tenaga kesehatan, dan kendala implementasi Elsimil. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur kebijakan stunting berbasis pendekatan sektoral dan lokal.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisis Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kota Bengkulu dalam Percepatan Penurunan Stunting. faktor-faktor pendukung dan penghambat serta Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kota Bengkulu dalam Percepatan Penurunan Angka Stunting.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, seperti yang dijelaskan oleh Pranee Liamputtong dalam bukunya *Qualitative Research Methods* (2020), berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman, perspektif, dan interaksi manusia dalam konteks sosial tertentu. Metode ini mencakup berbagai teknik pengumpulan data, seperti

wawancara mendalam, kelompok fokus, etnografi, dan studi kasus, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial dengan cara yang lebih holistik. Metode penelitian kualitatif, yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk mengeksplorasi kondisi objek yang alami dengan peneliti sebagai instrumen utama, menggabungkan beberapa sumber melalui triangulasi, serta menganalisis data secara induktif, dengan fokus pada makna daripada generalisasi.

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Ruskarini, 2017:10), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Dengan menerapkan metode kualitatif pada penelitian ini, bertujuan untuk mengatasi permasalahan terkait dengan peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dalam percepatan penurunan angka stunting di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Melalui metode ini, peneliti mengeksplorasi perspektif berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program percepatan penurunan angka stunting. Fokus utama penelitian adalah untuk memahami bagaimana program ini berjalan, apa saja kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas program tersebut. Data yang dikumpulkan bersifat naratif dan mendalam guna menangkap makna dan konteks sosial yang tidak bisa dijelaskan secara kuantitatif.

Setiap penelitian kualitatif dalam pemerintahan dapat memiliki variasi dalam desainnya, karena disesuaikan dengan sifat alami dari penelitian kualitatif itu sendiri yang bersifat dinamis, di mana fenomena dapat muncul secara tiba-tiba sesuai dengan prinsip alami (Simangunsong, 2017:190). Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sugiyono (2016:225) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, seperti angket, wawancara, pengamatan, ujian, dokumentasi, dan lainnya. Informan, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2015:163), adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian ini, informan terdiri dari 13 orang, termasuk pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, hingga masyarakat yang menjadi sasaran program percepatan penurunan angka stunting. Penelitian ini dilaksanakan selama 20 hari, yaitu dari tanggal 6 Januari 2025 hingga 25 Januari 2025

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengkaji dan menganalisis Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kota Bengkulu dalam Percepatan Penurunan Stunting. Peneliti menggunakan Teori Peran Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015), yang memiliki 4 dimensi sebagai berikut:

1. expectation (harapan) dengan indikatornya Target yang ditetapkan dan Harapan Terhadap Dampak Program
2. Norm (Norma) dengan indikatornya Regulasi dan Pedoman resmi dan tugas pokok dan fungsi setiap pihak terkait
3. Performance (Wujud dan perilaku) dengan indikatornya Interaksi dan Partisipasi dan Pelaporan informasi hasil kegiatan
4. evaluation (penilaian) dan sanction (sanksi) dengan indikatornya Hasil program timbal balik sanksi dan Apresiasi

3.1 Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu

Pada dimensi harapan, Harapan terhadap DP3A2KB sangat tinggi, baik dari internal dinas maupun masyarakat. DP3A2KB dipandang memiliki peran strategis dalam mendukung target penurunan stunting nasional hingga 14% di tahun 2024, bahkan berkomitmen untuk mencapai zero stunting di Kota Bengkulu. Harapan ini tidak hanya mencakup penurunan angka prevalensi stunting tetapi juga dampak jangka panjang berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ada ekspektasi untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif, data sasaran by name by address valid, dan program intervensi seperti KIE, PMT, serta pendampingan keluarga berjalan optimal.

Pada dimensi norma, Pelaksanaan peran DP3A2KB didasarkan pada regulasi dan pedoman formal, seperti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2023. Norma ini mengatur peran DP3A2KB sebagai koordinator lintas sektor yang bertanggung jawab atas pengelolaan data keluarga berisiko, pelaksanaan KIE, fasilitasi program PMT, penguatan program KB pasca salin, serta monitoring dan evaluasi. Meskipun norma ini sudah diterapkan secara internal, sosialisasi dan pemahaman terhadap norma ini di tingkat masyarakat dan lapangan masih memerlukan peningkatan. Pada dimensi kinerja, Peran DP3A2KB diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti interaksi langsung dengan masyarakat melalui Posyandu, pemberdayaan kader, pelaksanaan penyuluhan KIE, fasilitasi logistik PMT, dan penguatan pendampingan keluarga. Salah satu bentuk kinerja yang menonjol adalah intensifikasi koordinasi lintas sektor melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan monitoring data prevalensi stunting. Namun, terdapat kendala dalam hal pemerataan jangkauan layanan, terutama di daerah terpencil, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur.

Pada dimensi evaluasi dan sanksi, Evaluasi kinerja DP3A2KB dilakukan dengan menggunakan data prevalensi stunting (hasil survei SKI) sebagai indikator utama keberhasilan, yang dilengkapi dengan indikator proses seperti peningkatan partisipasi Posyandu dan pemahaman masyarakat. Namun, validitas data stunting menjadi kendala yang signifikan, sehingga perlu adanya mekanisme validasi yang lebih kuat. Dalam hal apresiasi dan sanksi, DP3A2KB lebih mengedepankan pendekatan pembinaan pada petugas atau kader yang kinerjanya belum optimal, serta memberikan penghargaan kepada kader atau Posyandu yang berprestasi.

3.2 Kendala Yang Dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Kota Bengkulu Dalam Percepatan Penurunan Stunting

Pelaksanaan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A2KB) Kota Bengkulu dalam upaya percepatan penurunan stunting menunjukkan adanya kemajuan, namun dalam prosesnya menghadapi berbagai kendala.

Kendala pertama adalah Keterbatasan Infrastruktur Kesehatan dan Akses di Daerah Tertentu. Meskipun upaya penurunan stunting difokuskan di seluruh kota, akan tetapi daerah terpencil atau pinggiran kota mungkin masih menghadapi tantangan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Hal ini dapat menyulitkan pemerataan jangkauan program yang dikoordinasikan atau dilaksanakan oleh DP3A2KB Kota Bengkulu. Keterbatasan akses ini

berpotensi menghambat petugas DP3A2KB atau mitra lapangannya untuk melakukan pendampingan, monitoring, dan distribusi bantuan secara optimal ke semua wilayah sasaran, sehingga menimbulkan potensi kesenjangan pelayanan.

Kendala selanjutnya adalah Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), baik dari segi jumlah maupun kapasitas. Dalam latar belakang menyebutkan bahwa jumlah tenaga kesehatan, ahli gizi, dan kader terkadang belum memadai untuk menjangkau semua wilayah, yang dapat mempengaruhi kualitas layanan. Keterbatasan ini juga dirasakan di tingkat pelaksana lapangan. Keterbatasan SDM ini, baik di tingkat dinas maupun di lini lapangan seperti kader, menjadi tantangan bagi DP3A2KB dalam memastikan kualitas implementasi program KIE, pendampingan, penanganan kasus rujukan, dan deteksi dini kasus stunting secara merata

Kendala selanjutnya yaitu terkait Implementasi Program Skrining Pra-Nikah (Elsimil) yang Belum Optimal dari Segi Waktu. dalam praktiknya, implementasi ideal ini sering terhambat. Salah satu penyebabnya adalah seringkali informasi mengenai pasangan yang akan menikah terlambat diterima oleh TPK atau petugas terkait dari tingkat RT/RW maupun Kelurahan. Keterlambatan pelaporan data catin dari tingkat paling bawah ini menyebabkan petugas tidak memiliki cukup waktu untuk menjangkau dan memproses catin sesuai linimasa ideal 3 bulan sebelum menikah. Akibatnya, masih banyak calon pengantin yang mendaftar atau melengkapi seluruh proses Elsimil (termasuk pemeriksaan kesehatan) dalam jangka waktu yang terlalu dekat dengan tanggal pernikahan. Keterlambatan ini secara signifikan mengurangi jendela waktu yang tersedia bagi TPK untuk melakukan intervensi dan pendampingan yang efektif jika ditemukan adanya faktor risiko (seperti anemia atau KEK) pada catin.

Kendala terakhir yang memerlukan perhatian serius adalah terkait Validitas dan Akurasi Data stunting di Kota Bengkulu. Sebagaimana diulas dalam Latar Belakang, penurunan angka prevalensi stunting yang sangat tajam dari 12,9% pada tahun 2022 menjadi 6,7% pada tahun 2023, meskipun menggembirakan, secara metodologis menimbulkan pertanyaan kritis. Penurunan lebih dari 6% dalam satu tahun untuk indikator status gizi kronis seperti stunting umumnya dianggap luar biasa cepat dan memerlukan kajian mendalam untuk memastikan apakah hal tersebut sepenuhnya mencerminkan perbaikan status gizi faktual atau turut dipengaruhi oleh faktor lain, seperti perubahan metodologi survei (meskipun SKI berskala nasional), cakupan sampel, atau kualitas pengukuran di lapangan. Ketidakpastian ini dapat menjadi kendala signifikan bagi DP3A2KB dalam perencanaan berbasis bukti dan evaluasi dampak program yang objektif. Potensi isu terkait kualitas pengukuran ini juga dirasakan di tingkat pelaksana lapangan. Penurunan angka yang terlalu signifikan tanpa penjelasan metodologis yang kuat berisiko menimbulkan complacency atau rasa cepat puas, padahal perbaikan status gizi membutuhkan upaya berkelanjutan. Bagi DP3A2KB, data yang diragukan validitasnya akan menyulitkan penetapan prioritas wilayah atau kelompok sasaran yang paling membutuhkan intervensi, serta mengaburkan evaluasi efektivitas dari berbagai upaya yang telah dilakukan. Oleh karena itu, kendala terkait validitas dan akurasi data ini tidak hanya memerlukan perhatian serius untuk perbaikan sistem pengukuran dan validasi, tetapi juga mengharuskan adanya kehati-hatian dalam menginterpretasikan hubungan antara peran yang dijalankan oleh DP3A2KB dengan data capaian penurunan stunting yang dilaporkan diharapkan.

3.3 Upaya Yang Dilakukan Dinas P3A2KB Dalam Rangka Penurunan Angka Stunting di Kota Bengkulu

Dalam menjalankan perannya dan menghadapi berbagai kendala yang ada, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana (DP3A2KB) Kota Bengkulu melakukan serangkaian upaya strategis dan operasional untuk percepatan penurunan angka stunting.

Upaya pertama adalah Penguatan Intervensi Gizi dan Kesehatan Sasaran. DP3A2KB secara aktif terlibat dalam memastikan kelompok rentan mendapatkan intervensi yang diperlukan. Ini termasuk fasilitasi program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Serta memastikan layanan kesehatan dasar berjalan optimal melalui koordinasi. Respon dari Masyarakat sebagai penerima manfaat dari program ini menunjukkan bahwa jenis bantuan ini disukai anak dan dirasakan manfaatnya oleh keluarga

Upaya kedua yang sangat ditekankan adalah Intensifikasi Edukasi, Pemberdayaan, dan Pendampingan Masyarakat, termasuk melalui Skrining dan Pendampingan Pra-Nikah. Menyadari pentingnya perubahan pengetahuan dan perilaku sebagai kunci jangka panjang, DP3A2KB mengencangkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), khususnya terkait 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Sebagai bentuk pencegahan dari hulu, upaya ini secara spesifik menasar para calon pengantin (catin) dan pasangan usia subur (PUS), termasuk yang baru menikah, melalui program skrining Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil). Program ini tidak hanya melakukan skrining kesehatan dan gizi (anemia, KEK, dll.) idealnya 3 bulan sebelum menikah, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk melakukan pendampingan kepada pasangan yang akan dan sudah menikah. Pendampingan ini bertujuan memberikan bekal pengetahuan mengenai kesiapan fisik, mental, dan gizi untuk kehamilan yang sehat, pentingnya perencanaan keluarga dan pengaturan jarak kelahiran, serta praktik pengasuhan dini yang benar untuk mencegah stunting sejak dari perencanaan keluarga. Pendampingan ini biasanya dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari Bidan, Kader PKK, dan Kader KB/PLKB. Upaya ini dilengkapi dengan pemberdayaan kader secara umum sebagai agen perubahan di tingkat komunitas.

Upaya ketiga berfokus pada Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dan Manajemen Program. DP3A2KB menyadari bahwa penanganan stunting memerlukan kerja sama berbagai pihak, sehingga upaya penguatan koordinasi menjadi sangat penting. Upaya ini diwujudkan melalui pengaktifan peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di semua tingkatan, dari kota hingga kelurahan, untuk memastikan semua OPD bergerak seirama. Dalam mendukung fungsi koordinasi TPPS ini, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), sesuai dengan amanat Perpres 72/2021, seringkali berperan penting dalam mendukung fungsi kesekretariatan TPPS di daerah, termasuk di Kota Bengkulu, guna memfasilitasi pertemuan dan konsolidasi program antar lembaga. Selain itu, manajemen program yang baik, terutama terkait data, juga menjadi fokus upaya DP3A2KB. Upaya ini juga mencakup pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk memantau kemajuan dan mengidentifikasi area perbaikan program, serta memastikan data yang akurat dan terkini menjadi basis pengambilan Keputusan. efektif.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini mengkaji peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A2KB) Kota Bengkulu dalam percepatan penurunan stunting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3A2KB memiliki peran yang strategis dan sentral dalam upaya menurunkan angka stunting, yang sejalan dengan kebijakan nasional dan regional untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Melalui analisis yang mengacu pada teori peran Biddle dan Thomas, temuan ini akan dibandingkan dengan lima penelitian terdahulu untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

Pertama, harapan masyarakat terhadap peran DP3A2KB sangat tinggi, terutama dalam hal

kontribusi signifikan terhadap penurunan stunting. Ini mencerminkan temuan dari penelitian Pusung (2024) yang menunjukkan bahwa program-program pemerintah lokal, seperti Kampung KB, berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga. DP3A2KB diharapkan tidak hanya memenuhi target kuantitatif, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia di Kota Bengkulu.

Dalam hal norma dan regulasi, DP3A2KB beroperasi berdasarkan berbagai pedoman resmi, termasuk Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021. Hal ini sejalan dengan Hutasoit (2024) yang menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan stunting. Meskipun norma-norma ini ada, tantangan dalam memastikan pemahaman dan kepatuhan dari seluruh pemangku kepentingan tetap menjadi pekerjaan rumah bagi dinas. Penelitian Putra (2024) juga menunjukkan bahwa keberhasilan program kesehatan sering kali tergantung pada pemahaman dan partisipasi masyarakat, yang menjadi tantangan tersendiri di lapangan.

Wujud nyata dari peran DP3A2KB terlihat dalam interaksi langsung dengan masyarakat melalui berbagai program, seperti penyuluhan gizi dan pendampingan keluarga. Hal ini sejalan dengan temuan Rudmini (2021) yang menunjukkan bahwa keterlibatan aktif pemerintah lokal dalam penyuluhan kesehatan berkontribusi pada pengurangan stunting. Namun, meskipun ada upaya tersebut, pelaksanaan program masih dihadapkan pada berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, yang juga diakui dalam penelitian Fatris (2021).

Kendala yang dihadapi DP3A2KB mencakup keterbatasan infrastruktur kesehatan di daerah terpencil, yang dapat menghambat akses layanan yang memadai. Penelitian ini menemukan bahwa banyak masyarakat di daerah pinggiran kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang optimal, mirip dengan temuan Hutasoit (2024) yang menunjukkan bahwa akses layanan kesehatan di daerah terpencil dapat menjadi tantangan besar dalam penanganan stunting.

Selain itu, tantangan validitas dan akurasi data terkait prevalensi stunting di Kota Bengkulu juga menjadi perhatian. Penurunan angka stunting yang signifikan dalam waktu singkat menimbulkan pertanyaan mengenai keakuratan data, yang sejalan dengan hasil penelitian Putra (2024) mengenai pentingnya validasi data dalam evaluasi program kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat capaian yang baik, perlunya evaluasi yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa data tersebut mencerminkan realitas di lapangan.

Upaya yang dilakukan oleh DP3A2KB dalam menghadapi kendala tersebut mencakup penguatan intervensi gizi dan kesehatan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang dihasilkan oleh Suhendri (2025) yang menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pelaksana di tingkat lapangan sangat penting untuk keberhasilan program kesehatan. DP3A2KB juga aktif melakukan koordinasi lintas sektor melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), yang merupakan langkah yang diakui dalam penelitian Hutasoit (2024) sebagai kunci keberhasilan program kesehatan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun DP3A2KB telah melaksanakan perannya dengan baik dalam upaya percepatan penurunan stunting, masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk mencapai efektivitas yang optimal. Dengan mengintegrasikan penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan upaya penanggulangan stunting di Kota Bengkulu dapat lebih berhasil dan berkelanjutan di masa depan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang didapatkan penulis di lapangan selama masa penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Peranan DP3A2KB Kota Bengkulu dalam percepatan penurunan stunting secara umum telah berjalan dan menunjukkan posisi sentral serta strategis sebagai koordinator sekaligus pelaksana kunci. Namun, masih ditemukan berbagai kendala signifikan yang saling terkait meliputi: keterbatasan infrastruktur dan akses layanan di wilayah tertentu yang menyulitkan pemerataan; keterbatasan kuantitas dan kapasitas teknis Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana di lapangan (kader/TPK); kendala implementasi program hulu seperti Elsimil terkait ketepatan waktu skrining/pendampingan akibat keterlambatan informasi dari tingkat bawah; serta isu krusial mengenai validitas dan akurasi data prevalensi stunting yang menyulitkan perencanaan berbasis bukti dan evaluasi objektif. Adapun upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut berupa penguatan intervensi gizi/kesehatan (fasilitasi PMT, koordinasi layanan dasar, KB pasca salin), intensifikasi edukasi, pemberdayaan, dan pendampingan (KIE 1000 HPK, skrining/pendampingan catin via Elsimil, penguatan kapasitas kader/TPK), serta penguatan koordinasi lintas sektor (optimalisasi TPPS, dukungan sekretariat BKKBN), peningkatan manajemen program (terutama pengelolaan data by name by address).

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu instansi pemerintah saja yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu sebagai model studi kasus yang dipilih.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Fatris, R. (2021). Strategi Dinas Kesehatan dalam penanggulangan prevalensi stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue. Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15868>
- Hutasoit, I. (2024). *Effectiveness of the policy to accelerate stunting reduction through convergence action for handling stunting in North Sulawesi Province*. *Jurnal Pendidikan*, 5(2), 45–54.
<https://infor.seaninstitute.org/index.php/pendidikan/article/view/2198>
- Liamputtong, P. (2020). *Qualitative research methods* (5th ed.). Oxford University Press.
<https://global.oup.com/academic/product/qualitative-research-methods-9780190304302>
- Moleong, L. J. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja

Rosdakarya.

- Nguyen, P. H., Nguyen, T. T. H., Avula, R., Tran, L. M., & Menon, P. (2021). Association of household food insecurity and stunting among under-five children in Jakarta, Indonesia: A cross-sectional study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(3), 1234. <https://doi.org/10.3390/ijerph18031234>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Jakarta: Kencana.
- Nurleli. (2024). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Deli Serdang. Tesis, Universitas Medan Area. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/24546>
- Poli, A., Pusung, P. H., Pratiwi, N. R., & Giroth, L. G. J. (2024). Peranan Kampung KB dalam pengendalian angka kelahiran di Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung. *Academy of Education Journal*, 15(1), 1093–1102. <https://doi.org/10.47200/aoej.v15i1.2397>
- Pramono, H. B., & Hidayati, N. (2020). Factors influencing stunting among children under five in Indonesia: an analysis of the Indonesia Nutrition Surveys. *Nutrients*, 12(11), 3301. <https://doi.org/10.3390/nu12113301>
- Putra, I. W., & Helmi, R. F. (2024). Peran Dinas Kesehatan dalam upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 8815–8822. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/13729>
- Ruskarini, D. (2017). *Dasar-dasar metode penelitian kualitatif*. Surabaya: Cakra Ilmu.
- Sarwono. (2016). *Teori Psikologi Sosial*. Rajawali.
- Simangunsong, F. (2017). *Metode penelitian sosial kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarsih, S., & Daryani, A. (2021). *Impact of exclusive breastfeeding and timing of complementary feeding introduction on stunting in Indonesian children under two years old*. *Public Health*, 195, 139–145. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2021.04.021>